

TINJAUAN**PENERAPAN E-GOVERNMENT MENDORONG TERWUJUDNYA  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DI INDONESIA  
(Tanggapan terhadap Instruksi Presiden Republik Indonesia  
Nomor 3 Tahun 2003)**Veronica A. Kumurur<sup>1</sup>, Rosyani<sup>2</sup> & Maria Ratnaningsih<sup>3</sup><sup>1</sup>Staf pengajar jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado<sup>2</sup>Staf pengajar Fakultas Pertanian Universitas Jambi<sup>3</sup>Staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Budi Luhur Jakarta

***Abstract.** Based on observations carried out in order to arrange Appendix I of Presidential Instruction No. 3 of 2003 stated that there are still some weaknesses that stand out for the formation of E-Government is the human resource constraints that hinder effective work processes, the rigid bureaucratic system, the absence of adequate strategies and that the lack of funds, there is still no coordination among the sectors to joint together to build a network of communication and information, and is still a limited capacity for communities to access these networks via the Internet. In addition, standardization of procedures and operational implementation of E-Government is a must for the government to set one up. From several weaknesses mentioned above, can be summed up that there are three things that mattered to implement E-Government to support the creation of Good Governance, namely: (1) Readiness of human resources; (2) bureaucracy or the State Organization, (3) Limitations of budget resources or funds; and (4) standardization of implementation and the basis for regulation. Of the problems mentioned above, the ability and readiness of governments to implement E-Government both in terms of human resources, the readiness of the bureaucracy, technological readiness and preparedness of communities as users need to be studied in depth. It is solely to determine the readiness and the benefits that would be obtained if the application of E-Government is set. Therefore, the purpose of writing this paper are: (a) to assess the extent of readiness of existing human resources to deal with the implementation of E-Government; and (b) to examine the extent to which the implementation of E-Government can influence the creation of Good-Governance seen from bureaucracy and the state administration has been running until today*

***Keywords:** E-Government, Good Governance, Environmental Degradation*

**PENDAHULUAN**

Indonesia pada saat ini tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara fundamental menuju ke sistem pemerintahan yang demokratis transparan serta meletakkan supremasi hukum. Perubahan yang tengah dialami tersebut memberikan peluang bagi penataan berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana kepentingan rakyat dapat kembali diletakkan pada posisi sentral. Sistem pemerintahan sebenarnya juga

merupakan suatu organisasi yang bersifat nasional di mana sebagai pemimpin organisasinya adalah seorang presiden dan pemerintahan adalah sebuah mekanisme yang digunakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat umum di mana banyak keputusan-keputusan yang diambil dan diperlukan oleh masyarakat hanya dapat diperoleh melalui peranan pemerintah. Sebagai contoh penentuan kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah pencemaran atau kerusakan lingkungan, penyediaan

infrastruktur, sistem keamanan, sarana pendidikan, dan sebagainya.

Tujuan dari rekayasa ulang penyelenggaraan atau manajemen pemerintahan adalah untuk meningkatkan produktivitas yang dalam hal ini adalah pelayanan pada masyarakat, mengoptimalkan nilai bagi penyelenggaraan negara, meningkatkan kinerja, mengkonsolidasikan berbagai fungsi, serta menghilangkan tingkatan pekerjaan yang tidak perlu. Untuk meningkatkan produktivitas, rekayasa ulang dilakukan untuk menciptakan proses-proses inovatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Paradigma pembagian tugas dan tanggung jawab secara vertikal digantikan dengan lintas fungsi yang berupa jejaring atau networking baik antara atasan dan bawahan maupun antar sektoral. Sedangkan untuk mengoptimalkan nilai bagi penyelenggaraan negara, rekayasa ulang dapat dilakukan dengan meningkatkan perhatian dan pengertian akan visi dan misi pemerintah, meningkatkan kerjasama, meningkatkan komunikasi, meningkatkan kerja kelompok, dan pemahaman kebutuhan. Yang tidak kalah penting adalah perlu peningkatan pengetahuan sumberdaya manusia yang ada sehingga mereka betul-betul paham akan tugas dan tanggung jawabnya dengan cara menambah ketrampilan dan memberdayakan tenaga yang sudah ada serta dilakukan evaluasi kinerja secara kontinyu untuk melihat sejauh mana kontribusi mereka atas penyelenggaraan negara.

Konsolidasi berbagai fungsi pemerintahan juga sangat diperlukan untuk menciptakan suatu bentuk organisasi yang lebih ramping, lebih datar, dan lebih cepat. Artinya bahwa birokrasi yang terlalu berjenjang perlu dipangkas untuk mempercepat pengambilan keputusan dan penyediaan pelayanan yang dibutuhkan. Bentuk organisasi yang ramping ini akan membuka peluang bagi organisasi untuk mampu dengan cepat menerima inovasi,

kebutuhan pasar, perkembangan teknologi, kecenderungan bentuk pelayanan yang diinginkan, dan sebagainya. Untuk mendapatkan bentuk organisasi yang ramping ini tentu diperlukan keberanian untuk menghilangkan tingkatan pekerjaan yang tidak perlu.

Sesuai dengan pertimbangan Presiden Republik Indonesia bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan e-government; serta diperlukan kesamaan pemahaman, keserempakan tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur kelembagaan pemerintah, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden bagi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan e-government secara nasional.

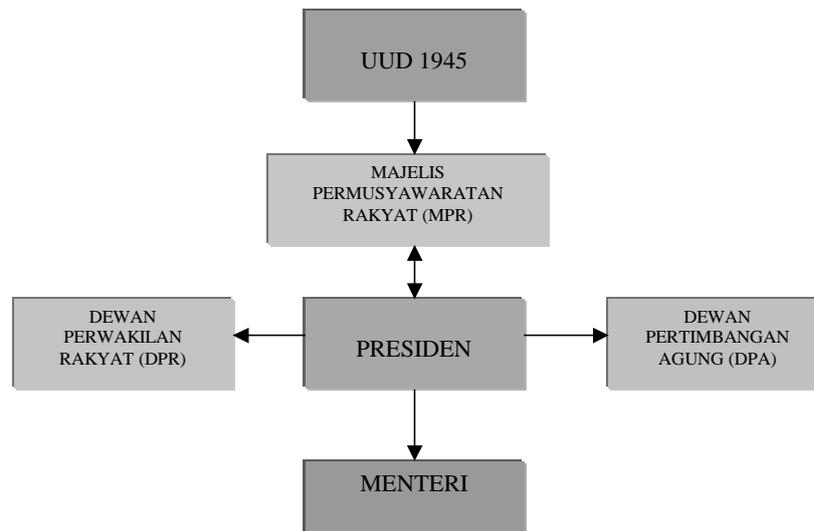
Terbitnya Instruksi Presiden Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, sebagai suatu wujud komitmen penyelenggara pemerintahan untuk memajukan bangsa Indonesia di tengah bangsa-bangsa lain di era globalisasi ini. Beberapa implikasi dan kendala yang akan ditemui akibat dari penerapan instruksi ini menjadi bagian dari pemikiran kita sebagai bagian dari bangsa ini.

#### **SISTEM DAN POLA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH INDONESIA SAAT INI**

Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UU 1945 sekarang ini menempatkan lembaga kepresidenan pada titik sentral dan posisi dominan di antara lembaga-lembaga lain dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan (Gambar 1). Jadi, dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggungjawab adalah di tangan Presiden (*concentration of power and responsibility*)

*upon the President*). Meskipun dalam sistem pemerintahan itu negara Indonesia berdasarkan atas kekuasaan belaka; pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, tidak bersifat absolutisme; kekuasaan negara tertinggi berada di tangan MPR, Presiden tidak dapat membubarkan DPR dan APBN harus mendapat persetujuan DPR. Dominasi

bernegara. Perjalanan pembangunan yang selama ini dilakukan seakan belum menampakan hasil yang optimal. Hal ini dapat dilihat dari hampir 59 tahun negara ini merdeka tetapi masih belum seluruh rakyatnya merasakan arti kemerdekaan karena masih banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan dan belum



Gambar 1. Presiden merupakan central figure sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi di bawah MPR dan ditegaskan dalam UUD 1945 (Bagan Eksekutif) (Diadopsi dari Salam 2002)

posisi ini disebabkan oleh kedudukan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan juga sekaligus Kepala Negara .

Manajemen pemerintahan daerah diatur oleh UUD 1945 pasal 18 yang lebih rinci lagi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam kedua undang-undang ini diakui hak-hak masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya dalam rangka pembangunan nasional.

### Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Indonesia

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang terus berupaya untuk membangun diri demi mencapai kemajuan kehidupan berbangsa dan

menikmati hasil pembangunan yang dicapai. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya tingkat pencapaian peningkatan daya tahan ekonomi untuk pertumbuhan pembangunan berkelanjutan, tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan, ketimpangan pemerataan kesempatan berusaha, kesenjangan pembangunan antar daerah, kesenjangan tingkat pendapatan antar golongan masyarakat, dan sebagainya.

Pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial yang dicanangkan pemerintah orde baru di tahun 1970an melalui konsep Delapan Jalur Pemerataan diterima secara bulat. Dari sisi tujuan dan pencapaian hasil, konsep ini memang memadai, karena hingga pertengahan tahun 1980an Indonesia berhasil mencapai

swasembada pangan, mengurangi jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan, menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Namun apabila dilihat dari sisi model manajemen pelaksanaannya banyak mengandung kekurangan karena model yang digunakan bersifat *sentralistis, birokratis, dan top down*. Beban pembangunan selanjutnya yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia adalah bahwa pada tahun 1990an sisi-sisi di luar aspek pertumbuhan ekonomi harus ditambah dengan masalah pemenuhan kebutuhan pokok manusia, masalah pelestarian lingkungan dan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. (Chaniago, 2001). Di samping itu, tekanan situasi politik dan ekonomi global menimbulkan kesulitan tersendiri untuk mengarahkan tujuan-tujuan pembangunan yang semakin luas ke dalam sebuah konsep pembangunan nasional, di mana salah satunya adalah beralih dari pembangunan ekonomi berbasis sumberdaya alam ke pembangunan ekonomi yang berbasis industri. Indonesia sebagai negara berkembang tidak siap menghadapi perubahan struktural ini. Negara-negara maju melalui lembaga-lembaga ekonomi multilateral dan perusahaan-perusahaan multinasional sepakat membawa negara berkembang melakukan penyesuaian struktural tanpa melihat kesiapannya.

Ketidaksiapan pemerintah dan tuntutan perubahan struktural ini menjadi salah satu pemicu sulitnya Indonesia keluar dari krisis yang besar yang terjadi pada tahun 1997. Ketidak konsistenan terhadap definisi pembangunan ekonomi dan sosial yang dicanangkan tahun 1970an menyebabkan pembangunan hanya berkonsentrasi pada wilayah-wilayah yang secara potensial dikembangkan secara ekonomi saja, sehingga persoalan baru di bidang pembangunan yaitu persoalan sosial, budaya, dan lingkungan hidup menjadi terabaikan. Melebarnya kesenjangan sosial-ekonomi dan merosotnya kualitas hubungan sosial, serta tidak adanya perubahan sistem

politik memberi sumbangan yang signifikan terhadap kesulitan keluar dari krisis yang berkepanjangan. Kenyataan ini juga menjadi penghambat untuk melaksanakan konsep pembangunan yang dicita-citakan oleh Bank Dunia dan PBB untuk memperbaiki kehidupan mayoritas masyarakat melalui program-program pengurangan ketimpangan pendapatan, pengurangan kemiskinan, pelestarian lingkungan hidup, pembangunan kesehatan, pembangunan masyarakat berbasis komunitas, pembangunan berkelanjutan, dan sebagainya. (Chaniago 2001).

Era reformasi yang didengungkan sudah kehilangan arah. Perkembangan situasi politik saat ini tampak tidak menunjukkan adanya kecenderungan perubahan. Tidak adanya transparansi dalam setiap pengambilan kebijakan, tidak jelasnya tujuan dan sasaran dari setiap kebijakan yang diambil, mutu dan kejujuran para pemimpin yang banyak diragukan, dan sebagainya. Semuanya ini masih menyisakan tanda tanya besar kapan Indonesia akan memiliki suatu pemerintahan yang benar-benar mampu untuk membawa bangsa dan negara menjadi suatu negara yang diperhitungkan dalam percaturan dunia.

Selama ini pemerintah menerapkan sistem dan proses kerja yang dilandaskan pada tatanan birokrasi yang kaku. Sistem dan proses kerja semacam itu tidak mungkin menjawab perubahan yang kompleks dan dinamis, dan perlu ditanggapi secara cepat. Oleh karena itu di masa mendatang pemerintah harus mengembangkan sistem dan proses kerja yang lebih lentur untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang kompleks dengan lembaga-lembaga negara lain, masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat internasional. Sistem manajemen pemerintah selama ini merupakan sistem hirarki kewenangan dan komando sektoral yang mengerucut dan panjang. Untuk memuaskan kebutuhan masyarakat yang semakin beraneka ragam dimasa mendatang harus

dikembangkan sistem manajemen modern dengan organisasi berjaringan sehingga dapat mempendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali.

Pemerintah juga harus melonggarkan dinding pemisah yang membatasi interaksi dengan sektor swasta, organisasi pemerintah harus lebih terbuka untuk membentuk kemitraan dengan dunia usaha (*public-private partnership*). Pemerintah harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik.

Dengan demikian pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju *e-government*. Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian seluruh lembaga-lembaga negara, masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat setiap saat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal. Untuk itu dibutuhkan kepemimpinan yang kuat di masing-masing institusi atau unit pemerintahan agar proses transformasi menuju *e-government* dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

#### **Pola dan Pergeseran Paradigma Pembangunan**

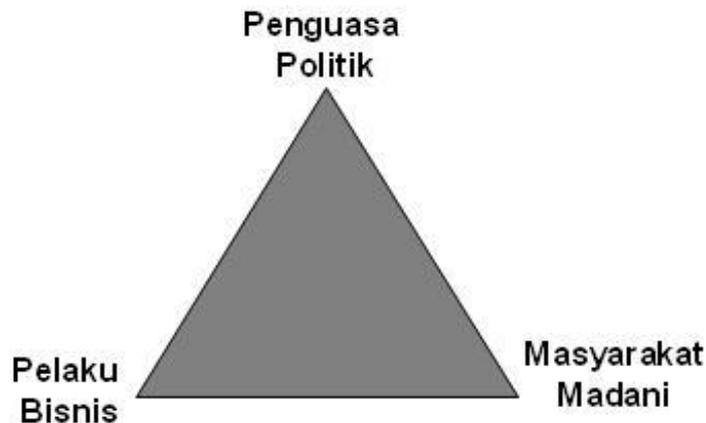
Pola pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia hingga saat ini berupa segitiga dengan Penguasa Politik di sudut puncak, Pelaku Bisnis disalah satu sudut, dan Kelompok Masyarakat Madani di sudut lainnya (Gambar 2). Posisi penguasa

politik yang berada di sudut puncak dari segitiga menggambarkan bahwa penguasa politik memiliki kekuasaan terbesar sehingga mampu mengkooptasi pelaku bisnis dan masyarakat madani. Oleh karena itu segitiga format penyelenggaraan negara menjadi tidak efektif lagi karena pelaksanaannya didominasi dan ditentukan oleh satu sudut saja yaitu penguasa politik yang dalam pelaksanaan tugasnya ditunjang antara lain oleh kekuatan partai politik terbesar dan kekuatan birokrasi (Salim 2000).

Pola penyelenggaraan negara yang terus berlangsung demikian tentu tidak akan membuahkan hasil pembangunan yang optimal. Pemberdayaan dan keterlibatan dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan harus ditingkatkan untuk menghindari ketimpangan yang selama ini terjadi. Kekuatan politik sebagai pemegang pemerintahan, khususnya Pemerintah Pusat, dianggap tidak berlaku adil karena telah menyedot sumber-sumber pembangunan khususnya kekayaan sumberdaya alam dari daerah dan terlalu sedikit yang kembali ke daerah.

Untuk itu diperlukan pergeseran paradigma pembangunan dengan cara mengembangkan format penyelenggaraan negara yang menitikberatkan hasil pembangunan bagi kemajuan bangsa. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan keanekaragaman proses pembangunan dengan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk terlibat dan ikut serta dalam pembangunan guna menghindari terciptanya asas tunggal pembangunan.

Pemberdayaan rakyat melalui pembukaan aksesibilitas seperti pemberian fasilitas informasi merupakan prioritas utama dalam mengembangkan pembangunan yang bersifat terbuka yang menggantikan orientasi pembangunan yang bersifat top down. Sebagai konsekuensinya, paradigma sentralisasi harus berubah menjadi desentralisasi yang memberikan otonomi kepada daerah agar dapat melaksanakan pembangunan sesuai dengan sudut pandang



Gambar 2. Pola Pemerintahan Negara Republik Indonesia  
(Diadopsi dari Salim 2000)

kepentingan daerah. Untuk itu, diperlukan adanya suatu jejaring atau *networking* antar semua sektor pemerintahan yang dapat diakses pula oleh masyarakat untuk menjamin agar arah pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan benar-benar sesuai dengan kepentingan rakyat, sehingga tercipta suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dengan demikian, meskipun ada dalam koridor otonomi daerah dan menghindari dominasi penguasa politik, pembangunan tetap dapat berjalan searah dan setujuan yaitu demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Lebih lanjut, pengembangan wawasan pembangunan yang sifatnya nasionalistik yang hanya bertumpu pada kepentingan dalam negeri saja harus mulai digeser kepada pembangunan yang berwawasan global seiring perkembangan yang terjadi. Bagaimanapun, suka atau tidak suka, dengan semakin tipisnya batasan suatu negara, Indonesia harus mau dan siap untuk terjun dalam kancah globalisasi di segala bidang.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah dalam berbagai jenis pelayanan masih dirasakan jauh dari sempurna. Prosedur dan mekanisme pelayanan masih berbelit-belit, tidak transparan, kurang menjamin kepastian

hukum, waktu, dan biaya, serta masih adanya praktek-praktek tidak terpuji dari oknum birokrat yang meminta imbalan yang tidak semestinya.

Beberapa faktor yang berhasil diidentifikasi dalam hasil rapat kerja PROPENAS Penyelenggaraan Bidang Pemerintahan yang menyebabkan adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan negara dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Belum ada pedoman umum tentang Standar Pelayanan Publik
- b. Belum semua instansi pemerintah memiliki Standar Pelayanan Minimal yang melayani publik
- c. Belum ada pedoman umum tentang Indeks Tingkat Kepuasan Masyarakat
- d. Belum semua instansi pemerintah memiliki Indeks Tingkat Kepuasan Masyarakat
- e. Masyarakat belum berpartisipasi secara maksimal dalam pelayanan publik

#### **IMPLIKASI PERUBAHAN PARADIGMA LAMA KE PARADIGMA E-GOVERNMENT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Berdasarkan pertimbangan presiden Republik Indonesia, bahwa kemajuan

teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat; serta bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Good Governance adalah suatu sistem pemerintahan yang baik di mana ada partisipasi, yang menyatakan semua institusi *governance* memiliki suara dalam pembuatan keputusan (Syaukani 2002).

Untuk menjamin terwujudnya pemerintahan yang baik seperti yang diamanahkan dalam GBHN tahun 1999 – 2004 diantaranya adalah:

- a. Membersihkan penyelenggaran negara dari praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme dengan cara meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan fungsional serta pengawasan masyarakat dengan cara mengembangkan etika dan moral.
- b. Meningkatkan kualitas aparatur negara dengan cara memperbaiki profesionalitas kerja dan memberikan penghargaan berdasarkan prestasi.
- c. Meningkatkan fungsi dan keprofesionalan birokrasi dalam melayani masyarakat dan akuntabilitasnya dalam mengelola kekayaan negara secara transparan, bersih, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.

Namun apa yang dicanangkan di atas hanya akan menjadi sebuah wacana apabila tidak ada kesungguhan dan niatan untuk melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, penerapan atau pelaksanaan *E-Government* diharapkan dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih karena keterlibatan masyarakat baik sebagai pelaku maupun berperan sebagai pengawas pembangunan akan dapat

terlaksana. Di samping itu, fungsi kontrol antar instansi atau sektor akan dapat terwujud pula karena upaya mempertegas pemilahan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari seluruh komponen kelembagaan penyelenggara negara dapat diterapkan.

Menurut UNDP dalam Syaukani (2002) dan telah dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengajukan 9 karakteristik *good governance*, yaitu:

- (1) *participation*; (2) *rule of law*; (3) *tranparancy*; (4) *responsiveness*; (5) *consensus orientation*; (6) *equity*; (7) *effectiveness and efficiency*; (8) *accountability*; (9) *strategic vision*. Prinsip-prinsip ini telah diadopsi dan dijadikan patokan atau pedoman pemerintah daerah Indonesia. Menurut Alfred (2002) bahwa perubahan paradigma birokrasi yang ada saat ini menjadi paradigma e-government sangat memberikan perubahan-perubahan pada orientasi, proses organisasi, prinsip manajemen, gaya kepemimpinan, komunikasi eksternal, serta prinsip penyerahan atau pengiriman pelayanan (jasa).

### **Perubahan Paradigma Birokrasi menjadi Paradigma E-Government**

Pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e-government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu: (1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik; (2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Alfred Tat-Key-Ho (2002), menyoroti hal ini dengan melihat dari tiga sisi yaitu dari sudut pandang manajemen, paradigma birokrasi, dan paradigma E-Government. (Tabel 1).

melalui banyak meja. Apabila dilihat dari paradigma E-Government, sudut pandang orientasi ini lebih diharapkan dapat memberikan kepuasan dan pengendalian pemakai dan bersifat lebih fleksibel

Tabel 1. Perbedaan Paradigma Birokrasi dan Paradigma E-Government ditinjau dari Sudut Pandang Manajemen Administrasi

No.	Sudut pandang	Paradigma Birokrasi	Paradigma E-Government
1.	Orientasi	Efisiensi biaya produksi	Kepuasan dan pengendalian pemakai, fleksibilitas
2.	Proses organisasi	Rasionalitas fungsional, departementalisasi, hirarki pengendalian vertical	Hirarki horizontal, organisasi jejaring, pembagian informasi
3.	Prinsip manajemen	Manajemen berdasarkan aturan dan mandat	Manajemen fleksibel, tim kerja antar departemen dengan koordinasi sentral
4.	Gaya kepemimpinan	Komando dan pengendalian	Fasilitasi dan koordinasi, kewirausahaan inovatif
5.	Komunikasi internal	Top down, hirarki	Jejaring ( <i>network</i> ) multi arah, dengan koordinasi sentral, komunikasi langsung
6.	Komunikasi eksternal	Terpusat, formal, saluran terbatas	Formal dan informal, umpan balik langsung dan cepat, saluran ganda.
7.	Bentuk penyerahan pelayanan	Bentuk dokumen, dan interaksi inter personal	<i>Electronic exchange</i> , interaksi tidak muka-dengan muka (sejauh mungkin)
8.	Prinsip penyerahan atau pengiriman pelayanan (jasa)	Standardisasi, ekuiti, dan tidak partial	Sesuai dengan keinginan pemakai ( <i>customization</i> ) dan personal.

Sumber : Alfred Tat-Key-Ho, Public Administration Review, July/August 2002, Vol 62, No.4. Iowa State University

Dari sudut pandang orientasi, paradigma birokrasi sesungguhnya menginginkan adanya efisiensi biaya dalam menghasilkan produk jasa bagi masyarakat. Namun yang terjadi hingga saat ini, khususnya di Indonesia, efisiensi biaya ini hampir tidak pernah terpenuhi melainkan justru ekonomi biaya tinggi. Sebagai contoh, pengurusan dokumen AMDAL seringkali memerlukan waktu berbulan-bulan akibat aparat pemerintah yang menangani bidang ini tidak memahami permasalahan yang ada, atau karena adanya kekakuan dalam birokrasi yang mengharuskan proses pengurusan dokumen yang harus dilakukan

dibandingkan melalui birokrasi. Dari sudut pandang organisasi, paradigma birokrasi menghendaki adanya rasionalitas fungsional, departementalisasi, dan hirarki pengendalian secara vertikal, sedangkan dari sisi paradigma *E-Government* hirarki pengendalian bersifat horisontal dengan mengandalkan organisasi jejaring serta pembagian informasi secara terbuka. Apabila dilihat dari sudut pandang prinsip manajemen, paradigma birokrasi lebih bersifat aturan dan mandat sedangkan paradigma *E-Government* lebih memungkinkan terjadinya manajemen yang fleksibel karena terciptanya tim kerja antar

departemen atau sektoral. Dari sudut gaya kepemimpinan, paradigma birokrasi menciptakan gaya kepemimpinan dengan sistem komando dan pengendalian secara terpusat sedangkan paradigma *E-Government* gaya kepemimpinan yang ada lebih memanfaatkan fasilitas dan koordinasi serta usaha-usaha inovatif. Komunikasi internal yang terjadi pada dalam paradigma birokrasi adalah *top-down* dan berdasarkan hirarki yang ada, sedangkan dalam *E-Government* komunikasi internal terjadi dengan multi arah dan komunikasi langsung melalui jejaring (*network*). Sedangkan untuk komunikasi eksternal, paradigma birokrasi bersifat terpusat, formal dan menggunakan sarana saluran komunikasi yang terbatas. Namun komunikasi eksternal melalui paradigma *E-Government* bisa bersifat formal-informal dengan umpan balik yang berlangsung cepat karena menggunakan fasilitas teknologi komunikasi yang memungkinkan terjadinya saluran ganda seperti *electronic exchange* yang tidak memerlukan interaksi antar muka secara langsung. Sedangkan dalam paradigma birokrasi interaksi berlangsung secara personal maupun dalam bentuk dokumen yang memerlukan waktu tersendiri untuk memperolehnya. Berdasarkan prinsip penyerahan atau bentuk pelayanan yang diberikan, paradigma *E-government* menyediakannya sesuai dengan keinginan pemakai, bersifat personal, dan terstandarisasi, sedangkan dalam paradigma birokrasi lebih bersifat partial, tidak berdasarkan standar pelayanan, tergantung siapa yang melakukan dan memberi keputusan.

#### **Terbentuknya sistem informasi yang baik yang menjamin transparansi dalam pelaksanaan *Good Governance***

Secara umum tujuan pemerintah untuk melaksanakan *E-Government* adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pelaksanaan *E-Government* dapat diterapkan melalui

kebijakan teknologi informasi manajemen yaitu dengan melalui perencanaan dan diikuti dengan mendisain sistem analisis yang akan digunakan. Apabila disain sistem analisis sudah dapat secara jelas dituangkan dalam kertas kerja maka segera dapat dilaksanakan penerapannya, dengan cara mengaplikasikan disain yang telah ditetapkan. Hasilnya akan dievaluasi untuk melihat dampaknya terhadap organisasi yang dalam hal ini adalah pemerintah. Hasil evaluasi ini akan sangat berguna untuk mengevaluasi pelaksanaan *E-Government* maupun mengevaluasi dampaknya terhadap *Good Governance*.

Dalam pengoperasiaannya, pengguna perlu secara terus menerus didorong untuk memanfaatkan jasa komunikasi dan informasi ini. Keseriusan dan antusiasme dari masyarakat pengguna jasa ini akan mendorong pemerintah sebagai pelaksana pembangunan untuk selalu menambah dan memperbaharui data-data yang dimiliki sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, sehingga data base yang dimiliki selalu bersifat *up to date*. Penerapan *E-Government* ini juga menuntut adanya perubahan dalam struktur organisasi pelaksanaannya. Evaluasi yang bersifat rutin harus terus dilaksanakan sehingga efektifitas pelaksanaan *E-Government* dapat dipantau dan dapat diperbaiki apabila terdapat keluhan yang signifikan dari pengguna.

#### **Pengelolaan Lingkungan Hidup menggunakan Sistem Informasi Manajemen**

Masalah yang selama ini dihadapi baik oleh pemerintah maupun masyarakat yang memerlukan informasi adalah adanya keterbatasan data. Sebagai contoh seringkali tuntutan kerusakan lingkungan akibat tumpahan minyak di perairan Indonesia tidak dapat dimintakan ganti rugi yang sesuai karena data kerusakan tidak dimiliki oleh Indonesia. Contoh lain, kerusakan hutan akibat kebakaran juga tidak dapat diprediksi dengan tepat karena tidak adanya data yang

lengkap dan akurat. Melalui program E-government di mana salah satunya bisa dimanfaatkan untuk menyediakan data yang lebih akurat karena dilakukan oleh semua daerah dan terintegrasi secara sentral, diharapkan inefisiensi penyelenggaraan negara dapat dikurangi.

Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah suatu sistem manajemen yang dijalankan dengan mengintegrasikan seluruh data atau mekanisme kerja dalam suatu organisasi. Tujuan SIM adalah untuk mencapai tujuan dari organisasi yang dapat dilakukan oleh seluruh lini organisasi dengan memanfaatkan sarana teknologi yang ada ada khususnya teknologi komputer. Pengelolaan Information Management (IT) dapat dimulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan monitoring yang dilakukan melalui Data base Management System (DBMS) yang berisi kumpulan fie yang saling berkaitan yang sudah terprogram. Data base ini berguna untuk menghindari terjadinya masalah-masalah pada penyusunan data seperti (1)Redundansi dan inkonsistensi data; (2)Kesulitan pengaksesan data; (3)Isolasi data untuk standarisasi; (4)Multiple user (banyak pemakai); (5)Masalah keamanan (security); (6)Masalah integrasi (kesatuan) dan (7) Masalah data independence (kebebasan data).

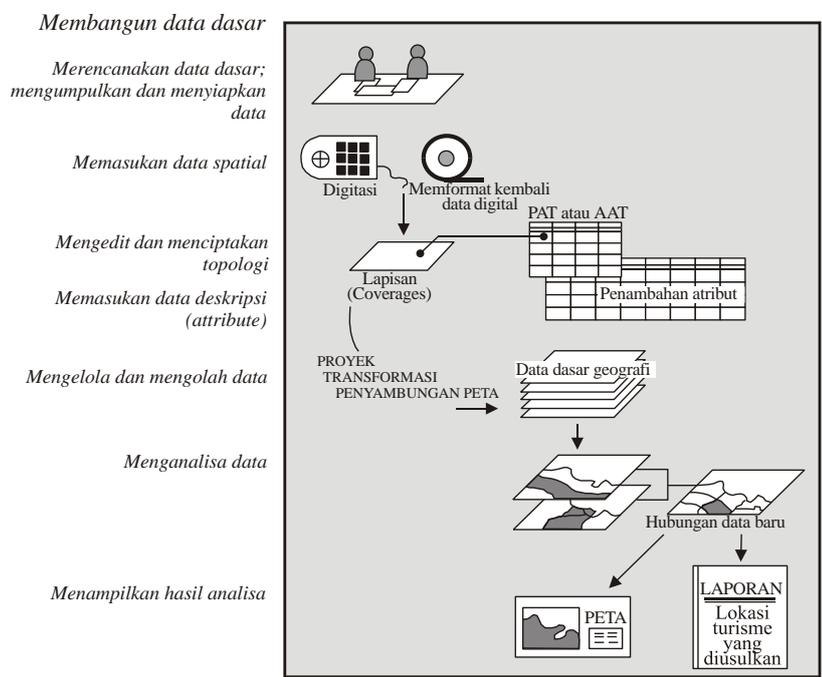
Salah satu program yang dapat digunakan sebagai sistem pendukung data adalah menggunakan data Geographic Information System (GIS) karena sistem ini mampu menampilkan data-data kondisi di

atas permukaan bumi. Keuntungan dari menggunakan GIS ini antara lain adalah selain mampu menyimpan data diskriptif yang berhubungan, juga mampu digunakan sebagai alat analisis, interpretasi, dan permodelan karena data GIS mampu mengidentifikasi hubungan spasial antara peta dan gambar (features). Sebagai contoh, pemakai dapat mengkombinasikan sebuah peta baru sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya untuk keperluan perijinan AMDAL, melalui GIS ini dapat dilihat topologi daerah yang diusulkan menjadi suatu kawasan usaha baru dengan memperhatikan kondisi sumberdaya alam dan lingkungan yang ada. Dari data GIS dapat pula dimunculkan informasi tentang tata guna lahan, infratraktur, perkampungan, sungai, dan sebagainya. Dengan demikian, tumpang tindih penggunaan lahan akan dapat dihindari.

Untuk membentuk suatu data dasar diperlukan perencanaan yang meliputi penetapan sistem yang akan digunakan, pengumpulan dan penyiapan data, kemudian memasukkannya sebagai data spasial. Dari data yang ada dapat diedit dan diciptakan peta topologi yang diinginkan dengan cara memasukkan data atribut. Langkah selanjutnya adalah mengelola dan mengolah data sesuai kebutuhan dan menganalisisnya (Gambar 4)

**KENDALA PELAKSANAAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA**

Seiring dengan munculnya gagasan *E-Government*, maka Presiden Republik



it Tingkat Pendidikan

Jumlah	Persen
313.502	8,0
215.894	5,4
2.339.780	59,3
268.460	6,8
194.293	5,0
613.849	15,5
3.945.778	100,0

Gambar 4. Mekanisme Pembangunan Data

Indonesia mengeluarkan *Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government*. Inpres ini bertujuan agar kebijakan *E-Government* dapat terlaksana berdasarkan kesamaan pemahaman, keserempakan tindakan dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur kelembagaan pemerintahan Indonesia. Saat ini telah banyak instansi pemerintah pusat dan daerah yang mempunyai inisiatif untuk mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi. Namun sejauh ini baru pada tingkat persiapan dan hanya sebagian kecil yang telah mencapai tingkat pematangan. Berdasarkan observasi yang dilakukan guna menyusun Lampiran I Inpres No. 3 tahun 2003 disebutkan bahwa masih ada *beberapa kelemahan* yang menonjol untuk pembentukan *E-Government* yaitu keterbatasan sumberdaya manusia sehingga menghambat proses kerja yang efektif, sistem birokrasi yang kaku, belum adanya strategi yang memadai dan adanya keterbatasan dana, masih belum ada koordinasi antar sektor untuk bersama-sama membangun suatu jaringan komunikasi dan informasi, serta masih adanya keterbatasan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan ini melalui internet. Di samping itu,

standarisasi prosedur dan operasional pelaksanaan E-Government juga menjadi suatu keharusan bagi pemerintah untuk menetapkannya.

Dari beberapa kelemahan yang disebutkan di atas, dapat disarikan bahwa ada tiga hal yang menjadi masalah untuk melaksanakan *E-Government* sebagai penunjang terciptanya *Good Governance* yaitu; (1) Kesiapan sumberdaya manusia; (2) Birokrasi atau Penyelenggaraan Negara; (3) Keterbatasan sumber anggaran atau dana; (4) Standarisasi pelaksanaan dan landasan peraturan

### **KESIAPAN SUMBERDAYA MANUSIA**

#### **Kualitas Sumberdaya Manusia**

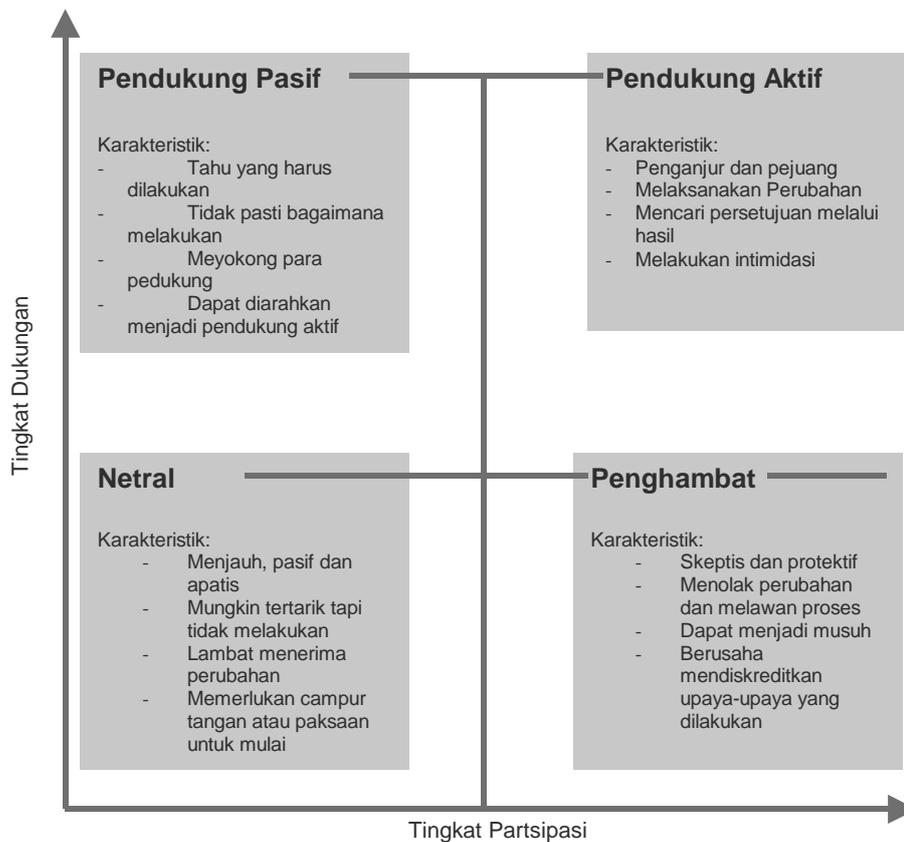
Salah satu kelemahan yang dihadapi oleh Indonesia adalah keterbatasan sumberdaya manusia yang terampil dan siap pakai serta memiliki tingkat pendidikan yang memadai. Menurut data statistik Indonesia tahun 2001 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik tercatat bahwa dari sekitar 3,9 juta Pegawai Negeri Sipil, 15,5% nya berpendidikan Sarjana, 5% berpendidikan Sarjana Muda, dan yang berpendidikan Diploma 1-3 sebanyak 6,8%. Pendidikan tertinggi yang terbanyak dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil adalah SMU yaitu sebanyak 59,3% (Tabel 2).

Dari data di atas tampak jelas bahwa sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Indonesia yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil tampak jauh dari memadai. Pelaksanaan *E-Government* yang menuntut suatu ketrampilan atau keahlian khusus setidaknya harus memahami pengoperasian komputer (*computer literate*) seakan sulit untuk dilaksanakan apabila ditinjau dari tingkat pendidikan yang dimiliki. Di samping itu, peran serta masyarakat baik sebagai pengembang, pengelola, maupun sebagai pengguna *E-Government* juga harus diperhatikan karena hal ini menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan dan pengembangan *E-Government*. Aspek ini

perorangan maupun organisasi, serta sejauh mana teknologi informasi disosialisasikan kepada masyarakat melalui proses pendidikan.

#### Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Melaksanakan E-Government

Tanggapan atau respons terhadap penerapan *E-Government* dapat berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lain. Sejauh mana tanggapan itu akhirnya dapat mempengaruhi pola pikir dari individu tersebut (Gambar 5). Dari diagram empat kuadran tersebut di atas terlihat bahwa dengan tingkat partisipasi yang rendah dan tingkat dukungan yang rendah pula, orang



Gambar 5. Empat Golongan Perubahan Paradigma Berpikir Sehubungan Dengan Penerapan E-Government ((Diadopsi dari Warren Bennis dan Michael Mische dalam bukunya Organisasi Abad 21, Reinventing melalui Reengineering, PPM, Jakarta 1995)

berkaitan dengan difusi teknologi informasi didalam kegiatan masyarakat baik

akan lambat dalam menerima perubahan, bahkan kemungkinan akan ada yang

menjauhkan diri dan bertindak pasif. Kemungkinan ada juga yang akan tertarik dengan perubahan tersebut tetapi tidak melakukan apa-apa. Biasanya pola berpikir seperti ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah sehingga menimbulkan rasa tidak percaya diri, juga akan banyak dialami oleh individu yang selama ini hanya akan bekerja atau bertindak apabila mendapat perintah. Dengan kata lain kemampuan atau daya kreatifitas dalam berpikir tidak pernah di asah hanya sebatas melakukan perintah.

Sedangkan di kuadran dengan tingkat partisipasi tinggi namun tingkat dukungan rendah justru akan menjadi penghambat dalam penerapan *E-Government* karena pola pikir yang terbentuk akan membuat seseorang menjadi skeptif dan protektif, melawan perubahan dan melawan proses, dapat menjadi musuh, serta berupaya mendiskreditkan upaya-upaya yang dilakukan. Biasanya orang yang akan bertindak demikian justru orang yang berpendidikan cukup tetapi tidak memiliki semangat untuk berkembang. Kebiasaan yang ada pada dirinya sukar dan tidak senang mengalami perubahan. Sebagai ungkapannya mereka akan bertindak apriori dan menunjukkan sikap menentang.

Bagi mereka yang mempunyai tingkat partisipasi rendah tetapi memiliki tingkat dukungan yang tinggi maka mereka tahu akan sesuatu yang harus dilakukan sehubungan dengan adanya perubahan tetapi masalahnya mereka tidak pasti apa dan bagaimana melakukan perubahan itu. Namun bagi orang yang berada dalam kuadran ini dapat didorong untuk memiliki pola pikir yang berubah yaitu menjadi pendukung aktif apabila diarahkan dan diberi pengertian tentang pentingnya suatu perubahan. Biasanya yang berada dalam kuadran ini adalah para pimpinan yang mau untuk mengembangkan diri tetapi memiliki keterbatasan dari sisi pengetahuan terlebih untuk penerapan *E-Government* yang pada

awal penerapannya memerlukan keahlian khusus.

Untuk seseorang yang berada pada kuadran dengan tingkat partisipasi tinggi dan tingkat dukungan tinggi, mereka memiliki karakteristik sebagai penganjur dan pejuang untuk dilakukan perubahan dan secara konsekuen akan melaksanakan perubahan yang ada. Untuk membuktikan bahwa perubahan itu penting mereka akan membuktikannya melalui pencapaian hasil dari perubahan yang dicapai. Dengan demikian mereka akan dapat melakukan intimasi kepada orang lain untuk menerima perubahan yang ada. Biasanya orang yang berada dalam kuadran ini adalah orang-orang yang memiliki pola pikir yang tinggi yang didasari tingkat pendidikan yang tinggi pula, memiliki wawasan yang luas serta ketrampilan yang tinggi. Dalam melakukan kegiatan sebelumnya mereka terbiasa untuk bekerja mandiri tanpa menunggu perintah.

Dari uraian di atas jelas bahwa perubahan paradigma berpikir dengan adanya perubahan pelaksanaan kegiatan yang biasanya bersifat rutin dan tradisional menjadi suatu kegiatan yang bersifat inovatif dan menggunakan teknologi maju akan ditanggapi secara beragam. Dapat dikatakan bahwa untuk mengubah pola atau paradigma berpikir seseorang ternyata harus diketahui dasar karakteristik masing-masing individu tersebut apakah dapat atau tidak menerima perubahan yang terjadi. Sehubungan dengan penerapan *E-Government*, apakah bisa dianggap efektif atau tidak, tentunya analisis dengan menggunakan diagram diatas menjadi penting untuk dilakukan.

### **Birokrasi dan Penyelenggaraan Negara**

Kewibawaan pemerintah sangat dipengaruhi oleh kemampuan menyelenggarakan pelayanan publik yang dapat memuaskan masyarakat. Ungkapan ini jelas sarat makna. Birokrasi merupakan suatu elemen yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian aktivitas politik yang berlaku dalam suatu negara, karena pada hakekatnya

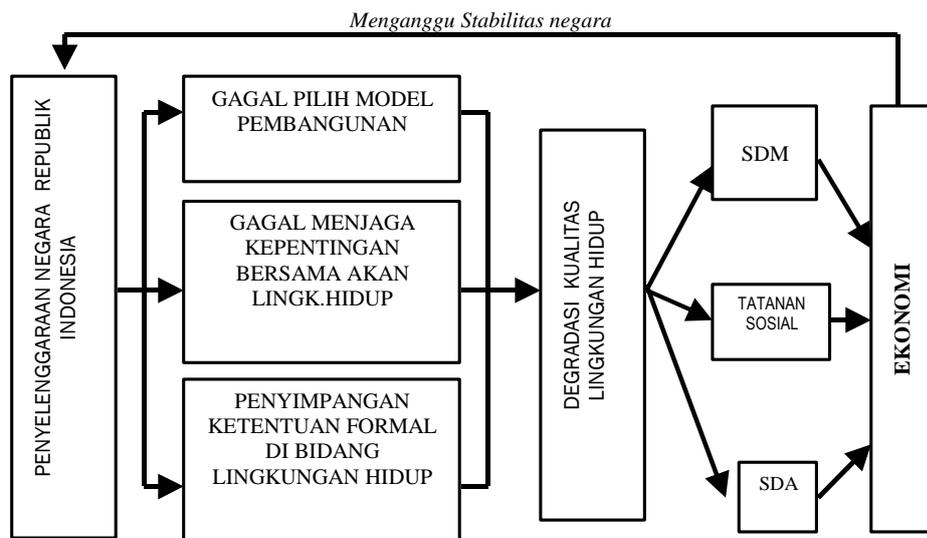
birokrasi dibutuhkan untuk melengkapi mesin-mesin politik terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat administratif. Oleh karena itu, para birokrat dibebani tugas untuk mampu berperan aktif dalam suatu sistem pemerintahan. Namun kenyataannya, kekakuan birokrasi justru sering menjadi penghambata dalam langkah-langkah pengambilan keputusan baik bagi individu maupun antar sektoral. Padahal untuk menciptakan komunikasi melalui *E-Government* diperlukan penataan sistem manajemen dan proses yang menunjang penguatan kerangka kebijakan. Oleh karena itu, kekakuan birokrasi menjadi suatu masalah yang harus diatasi atau semaksimal mungkin diubah agar tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan *E-Government*.

Di samping itu, penyelenggaraan negara akan menjadi sebuah sinergi antara masyarakat dan birokrat dalam menentukan arah pembangunan dan segala kebijakan ataupun keputusan-keputusan yang akan diambil oleh pemerintah guna mencapai tujuan atau target pembangunan. Kesiapan untuk mengubah paradigma pembangunan yang bersifat top down, menggunakan sistem hirarki kewenangan dan komando sektoral yang mengerucut dan memanjang, menjadi suatu sistem manajemen modern dengan sistem *networking* akan menjadi tantangan tersendiri, khususnya dalam pelaksanaan *E-Government*.

Secara global sarana teknologi komunikasi dan informasi (*E-Government*) adalah untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Hal ini dapat terwujud jika dilakukan serba terbuka dan transparan, serta dapat diawasi. Namun manajemen yang dilakukan pemerintah dilakukan oleh aparatur pemerintah (sumberdaya manusia), yang tentunya memiliki berbagai kendala kualitasnya (Widyaya, AW, 1991). Kendala tersebut berawal dari etika dan moral yang ada pada sumberdaya manusia seperti :

- a) Prinsip-prinsip etika harus disesuaikan dengan keadaan, waktu dan tempat. Prinsip etika yang bersifat authority, yang bersifat perintah menjadi suatu peraturan, sehingga kadang-kadang merupakan atribut yang tidak dapat dipisahkan.
- b) Dalam etika pemerintahan, apa yang dianjurkan merupakan paksaan (imperatif) yang dalam kehidupan sehari-hari dapat menimbulkan kesulitan.
- c) *Ethics pleasing to the sense*, karena etika harus ada hukumannya dengan kenyataan-kenyataan sosial. Teori tentang baik-buruk, indah dan tidak berkenaan dengan etika dan estetika berpegang pada harmoni dan keserasian fisik. Hubungan kehidupan manusia secara rasional tentang apa gunanya hidup dan alam. Sedangkan agama adalah penghubung antara etika dan kesempurnaan, agar manusia menemukan dirinya.
- d) Moral berkenaan dengan sikap dan dan kepribadian manusia, tingkah laku yang baik dan benar, sikap, semangat, mental atau bathin yang memancar dalam kepribadian (identitas, jati diri). Tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan manusia, kelompok, golongan, masyarakat, pemerintah.
- e) Pada umumnya tugas birokrasi dalam masyarakat luas senantiasa dikaitkan dengan segala sesuatu yang serba lamban. lambat dan berbelit belit serta formalitas, dalam penyelesaian urusan-urusan mendapatkan hambatan-hambatan yang memakan waktu lama dan tenaga, sehingga segala urusan menjadi tertunda penyelesaiannya kalau memahami peranan birokrasi maka tugas-tugas dibebankan kepada aparatur adalah lebih teratur dan lebih tertib, sehingga tidak akan terjadi penyimpangan dan atau penyelewengan. Namun kesan awal itu tampaknya mulai berubah setelah

- memahami birokrasi sejalan dgn penertiban apartur pemerintahan dewasa ini.
- f) Perpektif birokrasi di Indonesia, birokrasi merupakan suatu elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam rangkaian aktivitas politik yang berlaku dalam suatu negara, karena pada hakekatnya birokrasi dibutuhkan untuk melengkapi mesin-mesin politik terutama berkaitan efektif dalam memerintah; (b)pemerintah itu sendiri tunduk kepada aturan hukum yang berlaku; (c) pemerintah berdiri tegak sebagai wasit dan penjaga aturan hukum; (d) adanya perangkat-perangkat kelembagaan demokrasi yang berfungsi maksimal dan efektif.
- Paradigma penyelenggaraan pemerintah yang benar adalah pemerintah memerintah berdasarkan aspirasi dan



Gambar 6. Skema hubungan penyelenggaraan pemerintah, degradasi kualitas lingkungan hidup dan ekonomi (Kumurur 2003)

dengan hal-hal yang bersifat administrative. Sehingga birokrasi dibebani tugas untuk mampu berperan aktif dalam suatu system, politik terkait dengan harmonisasi kebutuhan antara individu maupun pengaturan harmonisasi hubungan antara tuntutan masyarakat dengan regulasi pemerintah. Namun hal tersebut tidak seharmonis sesuai tujuannya.

Pemerintahan yang baik bergantung pada paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang mensyaratkan 4 (empat) hal, yaitu (Keraf, S 2002): (a)pemerintahan itu sendiri benar-benar

kehendak masyarakat demi menjamin kepentingan bersama seluruh rakyat. Secara kasat mata kondisi penyelenggaraan pemerintahan kita sangat tidak baik, sebagai bukti konkritnya kita bisa melihat kenyataan sekarang, di mana kualitas lingkungan hidup di negara Republik Indonesia ini terus saja menurun. Hal ini dibuktikan dengan mulai langkahnya air bersih akibat hilangnya ruang terbuka hijau, hilangnya hutan akibat kebakaran hutan, penebangan hutan sehingga menurunkan debit air danau dan tidak bisa lagi mengairi sawah, atau yang paling tragis adalah terputusnya siklus hidrologi suatu wilayah, sehingga

mengakibatkan kekeringan yang hebat. Keadaan ini, bisa disimpulkan akibat kesalahan menyelenggarakan pemerintahan.

Dalam buku *Etika Lingkungan* (Keraf S, 2002) bahwa kegagalan pemerintah kita dalam menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia adalah: (1)kegagalan memilih model pembangunan, yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi dengan segala akibat negatif bagi lingkungan; (2)kegagalan pemerintah dalam memainkan peran sebagai penjaga kepentingan bersama, termasuk kepentingan bersama akan lingkungan hidup; (3)kegagalan pemerintah dalam membangun suatu penyelenggaraan pemerintah yang baik yang menyebabkan penyimpangan terhadap berbagai ketentuan formal di bidang lingkungan.

Kegagalan ini mengakibatkan terus terjadi degradasi lingkungan hidup di Indonesia, yang mengakibatkan terus menurunnya kualitas sumberdaya manusia, memporak-porandakan tatanan sosial, menurunkan kualitas sumberdaya alam dan semuanya itu akan menurunkan kualitas ekonomi. Tentunya ekonomi akan mempengaruhi keberadaan suatu negara atau mengganggu stabilitas suatu negara (Gambar 6).

Menurut Edward C. Tolman (dalam Bonnes, M & G. Secchiaroli 1995), bahwa perilaku adalah suatu yang secara tegas mendasari fisik dan detil fisiologis, dalam kaitan dengan proses penerimaan rangsangan, proses konduktor dan proses efektor dalam diri manusia. Menurut Baker dalam buku Sarwono.W (1992) bahwa tingkah laku tidak hanya ditentukan oleh lingkungan dan sebaliknya, melainkan kedua hal itu saling menentukan dan tidak dapat dipisahkan. Menurut Baker dalam dalam buku *Environmental Psychology, A Psycho-social Introduction* (Bonnes, M & G. Secchiaroli 1995), bahwa pengaturan perilaku ini sebagai gejala perilaku lingkungan, yang dibatasi oleh pola aktifitas manusia dan bukan manusia dengan sistem

kekuatan yang terpadu dan terkendali yang memelihara aktivitas mereka pada kondisi seimbang.

Berdasarkan teori bahwa manusia masih mempunyai kecenderungan untuk selalu mengerti lingkungan dimana ini merupakan salah satu ciri utama manusia sebagai makhluk berakal sehat (S. Kaplan dalam Sarwono 1992).

#### **Keterbatasan Anggaran atau Dana**

Membuat jaringan komunikasi secara luas tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Selain untuk membuat jaringan dan sistem informasi, masih dibutuhkan lagi dana untuk pembelian alat dan dana untuk mempersiapkan tenaga pelaksanaannya. Oleh karena itu, kajian secara mendalam tentang kesiapan dana atau anggaran untuk menunjang kelangsungan *E-Government* perlu dilakukan agar investasi yang dikeluarkan tidak menjadi sia-sia akibat pelaksanaannya tidak diikuti dengan kesiapan di bidang pendukung lainnya. Sumber dana untuk melaksanakan E-Government juga harus dipertimbangkan secara matang apakah akan menggunakan dana APBN atau didanai dari pinjaman Luar Negeri. Jangan sampai tujuan yang diinginkan yaitu mendapatkan pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan E-Government yang menghabiskan dana besar tidak tercapai tetapi justru menjadi tambahan beban negara.

#### **Standarisasi pelaksanaan dan landasan peraturan**

Standarisasi pelaksanaan dan landasan peraturan diperlukan untuk menilai kemampuan dalam melaksanakan transaksi, pengolahan, dan pengelolaan berbagai data atau informasi dalam pelaksanaan *E-Government*. Di samping itu standarisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi antar portal pemerintah, *electronic document management system*, serta landasan peraturan untuk mendukung keandalan dan

kerahasiaan transaksi informasi antar sektoral dan pemerintah daerah otonom serta masyarakat umum tanpa harus memahami struktur informasi pemerintah, merupakan suatu pekerjaan berat tersendiri yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan *E-Government*.

Standarisasi input jenis data dan metode penghitungannya juga merupakan suatu pekerjaan yang tidak mudah namun harus dibicarakan secara matang agar akurasi data tetap terjaga. Sebagai contoh, input data untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan kekayaan dan pengurusan sumberdaya alam serta dampaknya terhadap kerusakan lingkungan menjadi suatu pekerjaan besar tersendiri yang harus dipersiapkan secara matang. Pemberian ijin terhadap suatu kegiatan usaha yang harus dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) harus dilakukan secara transparan agar masyarakat sekitar objek juga memiliki hak untuk ikut menentukan boleh tidaknya usaha itu didirikan melalui data atau informasi yang dapat diakses melalui jaringan komunikasi dan informasi. Oleh karenanya, penetapan standar pengelolaan lingkungan juga harus menjadi suatu bahan pendidikan tersendiri bagi masyarakat agar mereka tahu batasan-batasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan boleh tidaknya suatu kegiatan usaha dilakukan. Objektivitas dari masing-masing pemerintah daerah otonom untuk melihat permasalahan lingkungan secara menyeluruh juga merupakan suatu tuntutan tersendiri yang perlu diperhitungkan agar kelestarian lingkungan secara nasional tetap terjaga.

### PENUTUP

Perubahan-perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat Indonesia, cepat atau lambat, menuntut pengetahuan, pengertian serta cara-cara untuk mengatasi perubahan-perubahan tersebut. Perubahan yang sedang dijalani terjadi pada saat dunia sedang mengalami transformasi menuju era masyarakat informasi. Kemajuan teknologi

informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transaksi perdagangan. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kecenderungan global tersebut akan membawa bangsa Indonesia ke dalam jurang *digital divide*, yaitu keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi.

Kelemahan yang dihadapi oleh Indonesia adalah keterbatasan sumberdaya manusia yang terampil dan siap pakai serta memiliki tingkat pendidikan yang memadai. Menurut data statistik Indonesia tahun 2001 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik tercatat bahwa dari sekitar 3,9 juta Pegawai Negeri Sipil, 15,5% nya berpendidikan Sarjana, 5% berpendidikan Sarjana Muda, dan yang berpendidikan Diploma 1-3 sebanyak 6,8%. Pendidikan tertinggi yang terbanyak dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil adalah SMU yaitu sebanyak 59,3%. Dari data di atas tampak jelas bahwa sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Indonesia yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil tampak jauh dari memadai. Padahal pelaksanaan *E-Government* menuntut suatu ketrampilan atau keahlian khusus setidaknya harus memahami pengoperasian komputer (*computer literate*).

Tanggapan atau respons terhadap penerapan *E-Government* dapat berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lain. Sejauh mana tanggapan itu akhirnya dapat mempengaruhi pola pikir dari individu tersebut. perubahan paradigma berpikir dengan adanya perubahan pelaksanaan kegiatan yang biasanya bersifat rutin dan tradisional menjadi suatu kegiatan yang bersifat inovatif dan menggunakan teknologi maju akan ditanggapi secara

beragam. Dapat dikatakan bahwa untuk mengubah pola atau paradigma berpikir seseorang ternyata harus diketahui dasar karakteristik masing-masing individu tersebut apakah dapat atau tidak menerima perubahan yang terjadi. Sehubungan dengan penerapan *E-Government*, apakah bisa dianggap efektif atau tidak, tentunya analisis dengan menggunakan diagram diatas menjadi penting untuk dilakukan.

Penyelenggaraan negara akan menjadi sebuah sinergi antara masyarakat dan birokrat dalam menentukan arah pembangunan dan segala kebijakan ataupun keputusan-keputusan yang akan diambil oleh pemerintah guna mencapai tujuan atau target pembangunan. Kesiapan untuk mengubah paradigma pembangunan yang bersifat top down, menggunakan sistem hirarki kewenangan dan komando sektoral yang mengerucut dan memanjang, menjadi suatu sistem manajemen modern dengan sistem *networking* akan menjadi tantangan tersendiri, khususnya dalam pelaksanaan *E-Government*. Perubahan-perubahan di atas menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Pemerintah harus mampu memenuhi dua modalitas tuntutan masyarakat yang berbeda namun berkaitan erat, yaitu : (a)masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif; (b)masyarakat menginginkan agar aspirasi mereka didengar dengan demikian pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan negara. Namun setiap perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara selalu disertai oleh berbagai bentuk ketidakpastian. Dengan demikian pemerintah harus mengupayakan kelancaran komunikasi dengan lembaga-lembaga tinggi negara, pemerintah daerah serta mendorong partisipasi masyarakat luas, agar ketidakpastian tersebut tidak mengakibatkan

perselisihan paham dan ketegangan yang meluas, serta berpotensi menimbulkan permasalahan baru. Pemerintah juga harus lebih terbuka terhadap derasnya aliran ekspresi aspirasi rakyat dan mampu menanggapi secara cepat dan efektif.

Penerapan e-government dalam pengelolaan pemerintahan Republik Indonesia akan mampu membantu terbentuknya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (e-governance), di mana penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan menjamin kondisi kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang baik pula. Lingkungan yang baik di mana terdapat kualitas sumberdaya alam yang baik dan akan menjamin kesejahteraan masyarakatnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfred Tat-Key-Ho. 2002. Public Administration Review. July/August 2002. Volume 62 No.4. Iowa State University. USA
- Anonimus. 2001. Hasil Rapat Kerja Propenas Penyelenggaraan Negara Bidang Pemerintahan, Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara, Jakarta, 19 Maret 2001.
- \_\_\_\_\_. 2003. Instruksi Presiden republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Jakarta
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Jakarta
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Jakarta
- \_\_\_\_\_. 1997. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta
- \_\_\_\_\_. 1999. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta

- \_\_\_\_\_. 1999. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Jakarta
- Chaniago, A. A. 2001. *Gagalnya Pembangunan: Kajian Ekonomi Politik terhadap Akar Krisis Indonesia*, LP3ES, Jakarta
- Bennis, Waren dan Michael Mische. 1995. *Organisasi Abad 21: Reinventing Melalui Reengineering*, PPM, Jakarta.
- Dayakisni, T & Hudaniah. 2001. *Psikologi Sosial (Buku 1)*. Penerbit Universitas Muhammadiyah. Malang
- Hardianto, D (Editor). 2001. *Otonomi dan Lingkungan Hidup*, KONPHALINDO, Jakarta
- Gie, K.K. 2003. *Pemberantasan Korupsi (Edisi II) Untuk Meraih Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan dan Keadilan*. Penerbit Pribadi. Jakarta
- Hardjasoemantri, K. 1999. *Hukum Tata Lingkungan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Hidayat, S. 2002. *Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan Ke Depan*. Pustaka Quantum. Jakarta.
- Keraf, S.A. 2002. *Etika Lingkungan*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Kristanto, H. 1996. *Konsep dan Perancangan Data Base*. Penerbit Andi Offset Yogyakarta
- Kumurur. V.A. 2003. *Penyelenggaraan Pemerintah yang Tidak Baik Mengakibatkan Krisis Ekologi Berkelanjutan (Makalah, tidak dipublikasi)*. Program Doktor Ilmu Lingkungan. Universitas Indonesia. Jakarta
- Lucas, HC, 2000. *Information Technology for Management*, Leonard N. Stern School of Business New York University. New York
- Osborne, D & T. Gaebler. 1992. *Reinventing Government*, Addison-Wesley Publishing, Canada
- Osborne, D & P. Plastrik. 2001. *Memangkas Birokrasi, Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*, PPM, Jakarta
- Putri, J.V. 2003. *Kamus Hukum & Glosarium Otonomi Daerah*. Yayasan Pendidikan & Bantuan Hukum Indonesia. Jakarta
- Salam, D.S. 2002. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Penerbit Djambatan. Jakarta.
- Sarlito Wirawan Sarwono. 1992. *Psikologi Lingkungan*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta
- Sarundayang, S.H. 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Soemarwoto, O.2002. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- \_\_\_\_\_. 1997. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Sudradjat, A. 1999. *Teknologi & Manajemen Sumberdaya Mineral*. Bandung: Penerbit ITB Bandung. Bandung
- Sugandhi, A. 1999. *Penataan Ruang dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Syaukani, H.R. 2003. *Akses Dan Indikator Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik (Access and Indicators to Good Local Governance)*. Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Otonomi Daerah (LKHK-Otda). Jakarta.
- Usman, R. 2003. *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti. Jakarta
- Widyaya, AW, 1991. *Etika Pemerintahan*. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.
- Wisaksono N. 2000. *Penyunting, Emil Salim: Revolusi Berhenti Hari Minggu*, Kompas, Jakarta



TINJAUAN